

KULTUR POLITIK ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH

Ali Sodikin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ali_sadikin6@yahoo.com

A. Pendahuluan

Politik Islam merupakan subjek pembicaraan yang selalu menarik dan *up to date* di kalangan masyarakat muslim. Wacana politik Islam selalu mengarah pada pemikiran tentang gagasan bentuk negara, pemilihan penguasa, wilayah kekuasaan, kewenangan penguasa, kewajiban rakyat, dan prosedur birokrasi lainnya. Gagasan gagasan tersebut secara historis sudah muncul pada masa klasik, yakni ketika Rasulullah Saw wafat. Hal pertama yang menarik perhatian umat Islam waktu itu adalah siapa yang berhak menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan itu memiliki magnet yang besar, dan membuat kalangan muslim waktu itu merasa berhak untuk andil di dalamnya. Perselisihan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'adah, adalah bukti bahwa politik itu memiliki potensi menyatukan sekaligus memecah belah masyarakat yang memiliki ikatan primordial yang sama.¹

Sepanjang sejarah Islam, dinamika politik Islam diwarnai dengan perbedaan pendapat, perselisihan, perseturuan, hingga pertumpahan darah. Secara ideologis, hal ini bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang menekankan prinsip syura, pemufakatan yang mengakomodasi pelbagai perbedaan. Politik Islam realitasnya berbeda dengan prinsip normatif Islam. Mereka yang awalnya sahabat di masa Rasulullah masih hidup, berubah menjadi musuh bebuyutan atas nama politik Islam. Jika pada masa Rasulullah banyak tentara Islam yang menjadi korban dalam perang untuk membela Islam, maka pasca Rasulullah wafat banyak tentara Islam yang menjadi korban karena perang saudara. Pergantian penguasa (dari satu khalifah ke khalifah berikutnya), atau pergantian kekuasaan (dari satu dinasti ke dinasti yang lain), acap kali diwarnai dengan jatuhnya korban di kalangan umat Islam. Semua ini terjadi atas nama politik Islam atau kekuasaan.²

Diferensiasi pola atau bentuk pemerintahan, beserta prosedur prosedur ikutannya, juga menunjukkan dinamika yang progresif sekaligus bukti bahwa sistem

¹ Dalam catatan Philip K Hitti, ada tiga kelompok yang berusaha memperebutkan kekuasaan pasca wafatnya Nabi Muhammad saw yaitu (1) Kelompok Muhajirin dan Ansar (disebut kelompok *sahabah*) dengan argumentasi masing masing, (2) Kelompok legitimis (*Ashab an nash wa ta'yin*) yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw menunjuk Ali Ibn Abi talib sebagai penggantinya, dan (3) Kelompok aristokrat Qurays yang dimotori oleh Bani Umayyah. Akhirnya kelompok pertamalah yang berhasil menduduki kekhalifahan, yaitu dengan terpilihnya Abu bakar as Shiddiq. Lihat dalam Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 175. Baca juga Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 217-218.

² Pergantian periode pemerintahan Khulafaur Rasyidun kepada Dinasti bani Umayyah diawali dengan perang Shiffin yang terjadi pada tahun 657 M di tepi barat Sungai Efrat. Ini adalah perang saudara pertama dalam sejarah Islam, antara pasukan Khalifah Ali Ibn Abi Talib dengan pasukan Gubernur Syria Umayyah Ibn Abi Sufyan. Lihat dalam Hitti, *History of the Arabs*, hlm. 225

politik Islam tidaklah monolitik. Masa khulafaur rasyidun sebagai kekhilafahan pertama dalam Islam, menjadi contoh terbaik dalam pembentukan sistem politik Islam. Keempat khalifah, mulai dari Abu Bakar as Shiddiq, Umar ibn Khattab, Usman ibn 'Affan, dan Ali ibn Abi Talib, dipilih atau terpilih dengan cara yang berbeda. Faktor penyebab perbedaan tersebut bukanlah didasarkan atas teks keislaman (Al Qur'an atau Hadis), tetapi pertimbangan situasi dan kondisi saat itu. Artinya, bentuk pemerintahan, cara pemilihan, hingga pengelolaan pemerintahan adalah sesuatu yang ijtihadi, sesuai dengan aspek temporal dan spatial. Sistem politik Islam pada masa klasik adalah produk historis yang terbuka pada perubahan.

Fase kedua pemerintahan Islam dan seterusnya, diwarnai dengan terbentuknya sistem politik yang berbeda dengan masa sebelumnya. Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah, Dinasti Usmaniyah (untuk menyebut beberapa saja), tampil dengan sistem pemerintahan monarkhi, dengan peralihan kekuasaan secara turun temurun. Pola ini menunjukkan upaya mengembalikan supremasi kesukuan Arab yang sudah mapan pada masa pra Islam. Gagasan demokratis Islam dalam sistem politik yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidun, diganti begitu saja oleh penerusnya. Alasan penggantian ini juga bukan berdasar pada normativitas teks keislaman, tetapi kebutuhan riil masyarakat saat itu. Oleh karena itu perubahan sistem politik Islam pada periode ini adalah hasil adaptasi terhadap sistem dan struktur sosial yang berlaku.

Hal yang menarik adalah bagaimana respon para ulama (termasuk di dalamnya para sahabat dan tabi'in) terhadap perubahan sistem politik ini. Dari data sejarah yang ada, para ulama tidak ada yang mempersoalkan secara serius atau memberikan justifikasi hukum (fatwa) atas kondisi perpolitikan Islam saat itu. Komentar para ulama lebih cenderung pada perumusan hak dan kewajiban penguasa maupun hak dan kewajiban rakyat. Bahkan yang terjadi adalah friksi di kalangan ulama sendiri, sehingga ada kelompok ulama yang pro pemerintah (para qadhi dan bawahannya), dan ada kelompok ulama yang independen.³ Friksi ini bukan disebabkan oleh ketidaksetujuan sistem politik yang berlaku, tetapi merupayakan upaya menjaga independensi keputusan hukum dari pengaruh politik. Para ulama independen hanya menjaga kompetensi relatifnya dalam kapasitasnya sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat.

Perubahan sistem politik Islam juga terjadi pasca terjadinya kolonialisasi di dunia Islam. Dinasti dinasti Islam yang pernah berjaya sebelumnya mengalami kemunduran dan keruntuhan. Wilayah wilayah Islam menjadi rebutan imperialisme Eropa, seperti Perancis, Inggris, Portugis, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, masuknya imperialisme juga diikuti dengan upaya perubahan sistem politik. Pengkaplingan wilayah imperium Islam mengakibatkan munculnya nasionalisme menggantikan konsep islamisme yang sudah terbentuk sebelumnya. Nasionalisme menjadi ideologi yang relevan untuk menjadi pengikat dan penguat umat untuk bersama sama keluar dari kolonialisme. Keberhasilan

³ Akibat dualisme hukum ini adalah munculnya perbedaan antara konsep hukum yang dikemukakan ulama dengan praktek hukum di pengadilan. Lihat dalam Noel J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 42.

konsep nasionalisme ini berimplikasi pada munculnya bentuk politik Islam baru, yaitu *nation state* atau negara bangsa. Dengan demikian berakhirilah sistem *khilafah* yang selama sebelas abad mewarnai sistem politik Islam.⁴

Namun demikian, konsep *nation state* ini juga bervariasi dalam implementasinya. Di wilayah Jazirah Arab konsep *nation state* dipadu dengan sistem monarkhi, di kawasan Asia dan Afrika menganut sistem republik. Perbedaan bentuk dan sistem pemerintahan ini menunjukkan adanya pengaruh struktur masyarakat terhadap kultur politik yang dibangun. Realitas realitas inilah yang menarik untuk dikaji, yaitu terjadinya dinamika dalam pembentukan sistem politik Islam dari masa ke masa. Tulisan ini ingin menjelaskan dinamika tersebut dalam konteks *continuity and change* politik Islam dan respon masyarakat terhadap kemunculannya. Proses tersebut akan dianalisis dengan menekankan pada pergulatan antara struktur masyarakat dan kultur politik yang terbangun. Kajian historis ini berguna untuk menjelaskan kedudukan sistem politik Islam, apakah sesuatu yang monolitik atau pluralistik.

B. Dinamika Politik Islam dari Klasik Hingga Modern

Secara historis, perkembangan sistem politik Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa periode, yaitu: periode kekhilafahan demokratis, kekhilafahan monarkhi (*daulah*), periode di bawah kolonialisasi, dan periode *nation state*. Dasar pengelompokkan ini adalah sistem politik yang diterapkan terutama pada aspek bentuk negara, pengalihan dan distribusi kekuasaan, serta *decision making* atau pengambilan keputusan. Aspek aspek tersebut akan dipaparkan beserta kondisi-kondisi sosial yang melingkupi terbentuknya sistem politik pada setiap periode.

1. Periode Kekhilafahan demokratis

Periode pertama ini disebut juga dengan periode Khulafa ar Rasyidun, yang dimulai sejak terpilihnya Abu Bakar As Shiddiq sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 29 tahun, yaitu antara tahun 11 - 40 H atau tahun 632 - 661 M. Selama masa Khulafa ar Rasyidun, terjadi empat kali pergantian khalifah yang berbeda proses pemilihannya. Tata cara pemilihan dan sistem peralihan kekuasaan pada masa ini mengindikasikan sistem politik yang demokratis sebagai implementasi dari prinsip syura dalam kepemimpinan Islam.

Khalifah pertama adalah Abu Bakar as Siddiq yang berkuasa selama dua tahun (11-13H/632-634M). Keterpilihan Abu Bakar melewati proses musyawarah yang alot, antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Majelis Tsaqifah Bani Sa'adah menjadi saksi atas perdebatan para sahabat senior tentang sistem politik yang akan dijalankan. Perdebatan ini dipicu oleh dua hal. *Pertama*, tidak adanya kejelasan sistem politik dari Rasulullah sebagai pemegang otoritas keagamaan.⁵ *Kedua*,

⁴ Berakhirnya sistem kekhilafahan Islam ditandai dengan berdirinya Republik Turki menggantikan Khilafah Daulah usmaniyah pada tanggal 29 Oktober 1923. Secara resmi kekhilafahan dihapuskan pada tanggal 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal at Taturk. Edward Montimer, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Enna Hadi dan rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 125

⁵ Dalam versi Sunni, Rasulullah tidak meninggalkan wasiat kepemimpinan, namun versi Syiah mengatakan sebaliknya. Mereka memiliki bukti adanya hadis yang bernilai sahih di kalangan Syiah,

persaingan kelompok sosial antara Muhajirin dan Ansar yang merasa memiliki hak yang sama atas kepemimpinan umat Islam. Akhir drama politik di Tsaqifah Bani Sa'adah adalah disetujuinya Abu Bakar sebagai khalifah oleh mayoritas umat Islam pada saat itu. Alasan pemilihan Abu Bakar adalah aspek senioritas, loyalitas, dan kapabilitas. Abu Bakar termasuk kelompok *as Sabiqun al Awwalun*, loyal kepada Rasulullah dalam mendampingi dakwahnya, dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dalam masalah keislaman.

Pengganti Abu Bakar adalah Umar Ibn Khattab, yang memerintah selama sepuluh tahun (13-23H/634-644M). Terpilihnya Umar melalui penunjukkan khalifah sebelumnya setelah berkonsultasi dengan beberapa sahabat senior. Keputusan Abu Bakar tidak dapat dianggap sebagai bentuk otoritarianisme, tetapi merupakan solusi yang tepat berdasarkan pengalaman politik sebelumnya. Terdapat kekhawatiran akan terjadi perpecahan internal di kalangan umat Islam, jika pengganti Abu Bakar dibiarkan mengambang di masyarakat. Oleh karena itu keputusan Abu Bakar tetap dalam ranah *syura*, karena terlebih dahulu berkonsultasi dengan sahabat senior di Madinah.

Pemilihan Usman Ibn Affan sebagai khalifah ketiga berbeda dengan dua pendahulunya. Pada akhir masa jabatannya, Khalifah Umar membentuk tim formatur yang terdiri dari tujuh orang, yaitu: Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, Abdurrahman Ibn Auf, Zubair Ibn Awwam, Talhah Ibn Ubaidillah, dan Abdullah Ibn Umar.⁶ Ketujuh orang ini termasuk sahabat terkemuka di Madinah. Khalifah Umar menginstruksikan kepada tujuh orang ini untuk bermusyawarah memutuskan penggantinya. Dari hasil musyawarah tim ini Usman Ibn Affan terpilih menjadi khalifah yang ketiga, dengan masa pemerintahan selama 12 tahun (23-35H/644-656M). Pada masa berikutnya, tim formatur bentukan Umar ini menjadi embrio munculnya konsep *ahl halli wal 'aqdi* dalam sistem politik Islam. Khalifah terakhir dari periode ini adalah Ali Ibn Abi Thalib yang berkuasa selama lima tahun (35-40H/656-661M). Proses pemilihan Ali sebagai khalifah sama seperti yang terjadi pada Abu Bakar, yaitu melalui musyawarah mayoritas umat Islam.

Dari aspek bentuk negara, periode ini sistem pemerintahannya bersifat sentralistik, dalam arti khalifah menjadi pusat pengelolaan pemerintahan. Semua keputusan berada di tangan khalifah sehingga model ini disebut *khalifah centris*. Tidak ada model pembagian atau pemisahan kekuasaan yang tegas sebagaimana yang ada pada sistem pemerintahan modern. Distribusi kewenangan terjadi antara pemerintahan pusat dan daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi kewenangannya tidak bersifat otonom, tetapi bergantung kepada pusat.

Sistem *khalifah centris* yang terjadi pada masa ini dipengaruhi oleh struktur dan kultur masyarakat. Dalam struktur masyarakat kesukuan Arab, model hubungan *patron-klien* masih melekat. Kedudukan khalifah menempati posisi patron yang tidak hanya menjadi kepala negara (politik) tetapi juga sebagai kepala agama.

bahwa Rasulullah mewasiatkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantunya.

⁶ Hasan Ibrahim Hassan, *Tarikh al Islam as Siyasi wa ad Diny wa ats Tsaqafi wa al Ijtima'y*, cet III (Kairo: Maktabah an Nahdhah al Mishriyah, 1964), hlm. 254-258.

Posisi inilah yang menjamin loyalitas klien di bawahnya. Faktor pendukung lain adalah kemampuan atau kapabilitas pribadi khalifah. Mereka yang terpilih sebagai khalifah secara kultural memiliki kemampuan lebih dalam bidang politik dan agama. Hal ini dilihat dari kedekatan mereka kepada Rasulullah, sehingga kemampuannya dianggap setara, dan juga latar genealogis mereka yang berasal dari suku yang berpengaruh, yaitu Suku Qurays.

Meskipun sentralistik, pada masa ini sistem politik Islam berkembang dinamis, terutama pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dan Usman Ibn Affan. Keduanya banyak melakukan inovasi dalam birokrasi pemerintahan dengan cara melakukan distribusi kewenangan. Inovasi tersebut diantaranya: pembentukan *diwan* (departemen) dengan mengadopsi model Persia, pendirian *Baitul Mal*, pemungutan pajak, baik berupa *kharaj* (pajak tanah) maupun *jizyah* (pajak kepala). Disamping itu, terdapat pembagian wilayah menjadi delapan propinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada setiap propinsi diangkat pula *qadi* yang bertugas memutuskan persoalan hukum di wilayah tersebut. Khalifah Usman memperkuat angkatan laut sebagai upaya menjaga dan memperluas imperium Islam.

2. *Periode Kekhilafahan Monarkhi*

Pasca berakhirnya fase Khulafa ar Rasyidun, tampillah Mu'awiyah Ibn Abi Sofyan menjadi inovator baru dalam sistem politik Islam. Pengalaman politik (mantan Gubernur Syria), aspek genealogis (klan utama dari suku Qurays), serta banyaknya loyalis membuatnya mengambil langkah berani yang berbeda dengan para pendahulunya. Dialah yang mengubah sistem politik Islam sebelumnya, dari demokratis menjadi monarkhi.

Periode kekhilafahan dengan sistem monarkhi ini dimulai sejak tahun 661 M hingga tahun 1924 M. Awal periode ini ditandai dengan berdirinya Daulah Umawiyah pada tahun 661 M dan akhir periode ini ditandai dengan berakhirnya kekhilafahan Turki Usmani yang diganti dengan Republik Turki yang sekular oleh Mustafa Kemal at Taturk. Pada periode ini, sistem politik Islam lebih dinamis dan mengalami pasang surut. Secara general, masa ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu kategori kekhilafahan monarkhi dengan sistem kesatuan khalifah dan kategori kekhilafahan monarkhi dengan sistem multi khalifah.

a. *Kekhilafahan Monarkhi dengan Sistem Satu Khalifah*

Periode ini berlangsung selama sembilan abad (661 M – 1528 M), dengan tampilnya dua daulah besar, yaitu Daulah Umawiyah (661-750M) dan Daulah Abbasiyah (750-1258). Daulah Umawiyah memulai praktik baru politik Islam, yaitu pengalihan kekuasaan secara turun temurun. Penguasa atau khalifah berasal dari keturunan Bani Umayyah, sehingga sistem ini disebut dengan istilah monarkhi. Praktik ini pada awalnya mendapatkan penolakan dari umat Islam, tetapi Muawiyah dengan kekuatan politiknya mampu membuat sistem ini berjalan hingga akhir keruntuhan daulah ini.

Argumentasi Muawiyah tentang penerapan sistem monarkhi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.⁷ Faktor internalnya adalah meluasnya wilayah Islam sehingga penerapan prinsip syura tidak dapat diterapkan lagi. Disamping itu adanya kekhawatiran munculnya konflik politik diantara umat Islam seperti masa sebelumnya. Faktor eksternalnya adalah adanya pengaruh sistem politik dari dua kekuasaan negara tetangga, yaitu Kekaisaran Byzantium di Romawi dan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Dua kerajaan ini menerapkan sistem politik monarkhi dan mengalami kejayaan pada masanya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya menunjukkan pudarnya sistem politik berdasarkan senioritas dan digantikan dengan sistem turun temurun.

Daulah Abbasiyah, yang menggantikan Dinasti Umayyiah juga menerapkan sistem politik yang sama. Kekhilafahan yang berpusat di Baghdad ini membangun sistem politik yang hampir sama dengan dinasti yang digantikannya. Dari sisi genealogis, penguasa Umayyah dengan Abbasiyah berasal dari suku yang sama, yaitu Qurays. Bani Umayyah merupakan anak keturunan Umayyah, sedangkan Bani Abbas adalah keturunan bani Hasyim. Dapat diduga bahwa kemunculan dua daulah ini adalah perebutan sekaligus perseteruan dua klan dalam menguasai perpolitikan di Jazirah Arab dan sekitarnya.

Sistem politik yang dibangun dua daulah ini bertumpu pada sistem satu khalifah sebagai penguasa resmi di dunia Islam. Guna mengamankan posisi khalifah dibentuklah pasukan pengawal raja dan pembangunan tempat salat khusus bagi khalifah di dalam masjid. Inovasi birokrasi juga dilakukan guna mendukung tata pemerintahan yang semakin kompleks. Beberapa departemen (*diwan*) didirikan seperti: *Diwan al Kitabah* (sekretaris negara), *Diwan al-Kharaj* (Pajak Tanah) yang tugasnya mengawasi departemen keuangan, *Diwan Khatam*, mengesahkan ordonansi pemerintah, *Diwan ar-Rasail* (surat menyurat), yang bertugas mengontrol permasalahan daerah-daerah dan komunikasi para gubernur.

Pada masa Abbasiyah terjadi perubahan sistem politik, berupa pendelegasian kewenangan khalifah. Struktur pemerintah pusat dibuat mengacu pada model kekaisaran Persia. Khalifah bertindak sebagai kepala negara, dalam kesehariannya otoritas sipil dipegang oleh *Wazir* (Perdana Menteri), otoritas pengadilan dipegang oleh *Qadhi al Qudhat* (Hakim Agung), dan otoritas militer dipegang oleh *Amir* (Jenderal). Struktur ini merupakan upaya adaptasi pemerintahan dengan mengacu pada perubahan struktur dan kultur yang ada di masyarakat. Sebagai negara besar, kekhilafahan Islam dituntut untuk menjalankan sistem pemerintahan yang efisien, stabil, dan dinamis. Oleh karena itu inovasi birokrasi selalu dilakukan, tetapi tanpa mengubah bentuk kekhilafahan monarkhinya.

b. Kekhilafahan Monarkhi dengan Sistem Multi Khalifah

Sistem ini diartikan sebagai sistem politik Islam dimana kekuasaan kekhilafahan terbagi dalam beberapa kerajaan (*daulah*). Meskipun pada awalnya

⁷ Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Konsep, Teori dan Praktiknya dalam Sejarah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm. 112.

posisi khalifah sebagai penguasa spiritual yang diakui hanya satu, namun dalam realitas politiknya setiap wilayah memiliki penguasa masing masing. Sistem ini sudah terjadi ketika Daulah Abbasiyah secara politik sudah mulai melemah. Beberapa wilayah yang jauh dari Baghdad membentuk negara otonom yang tidak mendapatkan kontrol dari Abbasiyah.

Negara otonom pertama yang lepas dari kontrol Baghdad adalah Daulah Umayyah di Andalusia (756-1031M). Daulah ini berhasil menguasai wilayah Andalusia (Spanyol) dan membangun kerajaan di sana. Di Maroko, kaum Syiah yang tertindas oleh kekuasaan Abbasiyah mendirikan Daulah Idrisiyah yang berpusat di Fez dan berkuasa antara tahun 788-974M. Di Mesir, Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah juga berdiri dan berkuasa antara tahun 909-1171 M. Munculnya Daulah Idrisiyah dan Fatimiyah ini memberikan satu varian baru sistem politik Islam selain khilafah. Faham keagamaan Syiah memperkenalkan model sistem politik Imamah yang lebih eksklusif, karena hanya memberikan hak kekuasaan kepada keturunan ahlul bait, yaitu keturunan Ali Ibn Abi Thalib dan Fatimah. Daulah Syiah lainnya yang pernah berkuasa adalah Daulah Hamdaniyah di Mesopotamia yang berdiri antara tahun 929-991M) dan Daulah Buwaihi yang berkuasa di Persia tahun 945-1055M.⁸

Di wilayah barat Baghdad juga muncul beberapa daulah kecil yang otonom tetapi masih mengakui kekhalifahan Abbasiyah. Diantaranya adalah: Daulah Aghlabiyah di Kairawan (800-909M), Daulah Tulun di Mesir (868-905M), dan Daulah Iksidiyah di Fustat (935-969M). Di wilayah timur Baghdad muncul Daulah Tahiriyah di Khurasan (820-872M), Daulah Saffariyah di Persia (867-908M), Daulah Samaniyah di Bukhara (874-999M), Daulah Ghaznawiy di Afghanistan (962-1186), Daulah Saljuk di Mesir (1038-1194M). Pada awalnya, penguasa daulah daulah kecil ini adalah para gubernur Abbasiyah di wilayah masing masing. Ketika kekuasaan pusat melemah, mereka mulai membangun kekuatan dan melakukan perluasan wilayah. Secara politik kondisi ini menguntungkan, karena mereka leluasa membangun dinasti yang otonom. Mereka tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol penguasa spiritual, sehingga gelar yang digunakan bagi penguasa adalah sultan atau amir dan bukan khalifah.⁹

Kekhalifahan mendapatkan momentumnya kembali ketika Daulah Usmaniyah tampil dan berkuasa. Dengan tetap mengusung sistem monarkhi, daulah yang dikenal dengan sebutan Turki Usmani ini membangun kerajaan yang besar dan kuat. Daulah ini didirikan oleh Usman pada tahun 699H/1305M. Pada awalnya, Usman adalah panglima perang dari Daulah Saljuk yang kemudian ditunjuk menjadi gubernur di Sugyat. Ketika penguasa Saljuk meninggal tanpa putera mahkota, Usman memproklamkan diri sebagai sultan dengan gelar Padisyah Al-Usman. Usman dan keturunannya berhasil membangun daulah Usmaniyah yang berpusat di Istanbul hingga tahun 1924M, setelah Mustafa Kemal At-Taturk menggantikan sistem kekhalifahan dengan Republik Sekuler.

⁸ Hitti, *History of the Arabs*, hlm. 573-580

⁹ *Ibid*, hlm. 585

Kehadiran Daulah Usmaniyah memberikan corak baru sistem politik Islam. Meskipun dengan kerangka politik yang sama, monarkhi, tetapi daulah ini memberikan sentuhan kultur yang baru. Dalam hal kewenangan pemerintahan terjadi desentralisasi, yaitu pembagian dan distribusi kewenangan pusat ke daerah. Struktur pemerintahannya semi demokrasi dengan komposisi Sultan sebagai penguasa tertinggi, kepala pemerintahan adalah *Sadr al-A'zam* (perdana menteri), sedangkan kepala agama adalah *Syaikh al-Islam* (Mufti).¹⁰ Pemerintahan dibagi dalam beberapa propinsi dan kabupaten. Gubernurnya bergelar pasha sedangkan bupatinya bergelar *Zanaqiq* atau Al-Alawiyah. Kultur baru yang muncul pada daulah ini disebabkan persentuhannya dengan masyarakat Eropa. Daulah ini tidak hanya berhasil menguasai wilayah kekhilafahan Abbasiyah sebelumnya, tetapi juga sukses merebut wilayah Bizantium dan mengambil alih Konstantinopel. Wilayah Eropa yang ditaklukkan daulah ini meliputi; Yunani, Bulgaria, Anatolia, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania.¹¹ Dari sinilah muncul perpaduan kultur antara Arab, Persia, dan Eropa.

Selain Usmaniyah, di wilayah Persia muncul Daulah Safawiyah yang beraliran Syiah dan berkuasa antara 1501-1732.¹² Sementara di Asia Selatan, khususnya di India, berdiri Daulah Mughal yang memerintah wilayah India antara tahun 1526-1857.¹³ Kehadiran dua daulah besar ini menunjukkan bahwa pada masa ini, umat Islam secara politik menerima sistem multi khalifah. Kehadiran beberapa daulah pada masa yang sama tidak saling mengganggu, tetapi menghormati wilayah dan otoritas politik masing masing. Keruntuhan daulah Safawiyah maupun Daulah Mughal bukan karena diserang oleh Daulah Usmaniyah, tetapi karena perebutan kekuasaan oleh penguasa lokal dan juga meluasnya imperialisme Eropa di wilayah Asia.

3. Periode Di bawah Kolonialisasi

Kolonialisasi Eropa atas dunia Islam dimulai pada tahun 1798M, ketika Napoleon Bonaparte dari Perancis melakukan ekspedisi ke Mesir. Pada akhirnya mereka menguasai Mesir hingga tahun 1882, yang kemudian digantikan oleh Inggris. Setelah itu beberapa wilayah Islam mulai dikuasai oleh Perancis, Inggris, Rusia, dan Italia. Perancis menguasai Aljazair (1830), Tunisia (1881), dan Maroko (1911). Inggris menguasai India (1857), Afganistan (1879), Baluchistan (1899). Cengkeraman kolonialisasi juga terasa hingga Asia Tenggara, yang dimulai dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Satu persatu wilayah

¹⁰ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya I* (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 117

¹¹ Puncak ekspansi Daulah Usmaniyah adalah ditaklukkannya Constantinopel pada tahun 1453 M oleh Muhammad II Al Fatih. Setelah dikuasai, kota ini diubah namanya menjadi Istambul, yang artinya tahta Islam. Lihat dalam Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 60.

¹² Daulah Safawiyah berusaha memantapkan Syi'isme di Iran dengan menjadikan syiah sebagai mazhab negara. Lihat Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), hlm. 296.

¹³ Penguasa yang dianggap berhasil mengokohkan kekuasaan Mughal di India adalah Akbar Khan. Model pemerintahannya adalah militeristik. Guna menjaga stabilitas politik dan sosial dia menerapkan *Sulh E Kul* dan *Din Ilahi*. Lihat dalam M. Mujib, *The Indian Muslim* (London: George Press, 1967), hlm. 256.

kesultanan Islam menjadi jajahan Eropa, termasuk wilayah Indonesia. Inggris, Belanda, Perancis, Portugis berbagi daerah kolonisasi hingga pertengahan abad ke XX.

Masuknya imperialisme Eropa menguasai wilayah Islam berimbas pada runtuhnya tatanan politik yang ada. Para imperialis mengambil alih bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga politik, hukum, dan sosial budaya. Kebutuhan akan bahan baku rempah dan barang dagangan lainnya menjadi alasan bangsa Eropa menguasai sumber ekonomi umat Islam. Penguasaan bidang ekonomi juga diperkuat dengan mengambil alih kekuasaan. Semua wilayah Islam yang ditaklukkan dimasukkan sebagai daerah jajahan yang tunduk pada aturan penjajahnya. Akibatnya, semua sendi-sendi kenegaraan mengalami perombakan dan penggantian dengan sistem yang berlaku di Eropa. Dalam bidang hukum misalnya, hukum Eropa, baik *code civil* maupun *code penal* menggantikan hukum Islam yang sebelumnya berlaku.¹⁴ Inilah babak baru munculnya reformasi struktural yang berakibat dan berpengaruh pada reformasi kultural.

Sistem politik Islam yang berlaku di negara jajahan dihapus dan diganti dengan sistem politik Eropa. Tidak ada lagi khalifah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kewenangan politik dan spiritual. Perannya dalam bidang politik digantikan oleh gubernur jenderal dari negara imperialis. Terpecahnya wilayah Islam akibat pembagian kolonisasi mengakibatkan hubungan politik antar wilayah Islam menjadi terputus. Umat Islam di setiap wilayah berjuang dan memikirkan nasib masing-masing karena tidak adanya kesatuan politik seperti periode kekhilafahan. Dalam waktu yang lama, kurang lebih satu abad, umat Islam kehilangan kendali politik atas wilayahnya sendiri.

Respon politik umat Islam terhadap imperialisme adalah munculnya gerakan pembaruan yang bertumpu pada semangat pan-Islamisme dan nasionalisme. Namun, karena realitas politik yang tidak mendukung, semangat nasionalisme lebih menggelora daripada semangat Pan-Islamisme. Konsep nasionalisme inilah yang menjadi alat pergerakan untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Akibatnya, ketika wilayah-wilayah Islam mendapatkan kemerdekaannya, yang tumbuh dan berkembang adalah sistem politik yang bertumpu pada *nation state* bukan kekhilafahan. Model politik *nation state* dipengaruhi oleh sistem politik Eropa yang sudah diterapkan sebelumnya. Maka, berkembanglah negara-negara demokrasi yang batas wilayahnya mengikuti batas wilayah imperialisme. Sistem pemerintahan yang berlaku banyak mengadopsi sistem Eropa dengan beberapa penyesuaian berdasarkan kultur masyarakat masing-masing.

4. *Periode Nation State*

Periode ini dimulai ketika umat Islam, di masing-masing teritorinya, memperoleh kemerdekaan. Kebutuhan mendesak sebagai negara merdeka adalah mempersiapkan unsur-unsur pokok berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, negara-negara baru ini kemudian merancang konstitusi sebagai kerangka pokok sistem pemerintahan yang akan diberlakukan. Dalam situasi inilah pengaruh sistem politik sebelumnya tidak dapat dilepaskan begitu saja. Terjadilah adopsi dan adaptasi sistem politik dari negara kolonial yang diimplementasikan ke dalam negara merdeka yang baru. Maka, dapat dipahami jika yang sistem politik yang

¹⁴ Adopsi hukum Eropa ini dimulai pada masa Usmaniyah melalui reformasi Tanzimat yang terjadi antara tahun 1839-1876 M. Lihat Coulson, *Hukum Islam...*, hlm. 177-178.

terbentuk pada masa ini bukan sistem kekhilafahan, tetapi sistem *nation state* yang demokratis.

Sistem politik *nation state* memberikan keleluasaan setiap wilayah merdeka untuk membangun model atau bentuk negara sesuai kontrak sosial warga negaranya. Sistem ini didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Terbentuknya *nation state* merupakan hasil sejarah alamiah yang semi kontraktual dimana nasionalisme menjadi landasan pendiriannya. Kesatuan kebangsaan, bukan kesatuan keagamaan, menjadi pengikat terbentuknya *nation state*. Dalam praktiknya terjadi variasi bentuk *nation state*, seperti negara kesatuan, federasi, maupun konfederasi. Demikian halnya juga dengan bentuk pemerintahan, ada yang model presidensiil dan ada pula yang menggunakan sistem ministeriil. Di tinjau dari jenis kekuasaan, ada yang berbentuk monarkhi maupun demokrasi. Sistem monarkhi yang dipraktikkan juga ada dua macam, yaitu monarkhi absolut maupun monarkhi konstitusional.

Variasi sistem politik dalam *nation state* memiliki kontinuitas dengan realitas sistem politik sebelumnya. Aspek lainnya yang menentukan bentuk politik adalah pengaruh pemikiran para *founding fathers* negara. Sehingga dua aspek penting yang mempengaruhi penentuan sistem politik sebuah *nation state* adalah realitas masyarakat dan idealitas pemikiran warganya. Dua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya variasi bentuk negara maupun pemerintahan di beberapa negara Islam. Di sisi lain, munculnya variasi sistem politik juga menumbuhkan kembangkan pemikiran politik Islam yang juga variatif. Kultur politik yang terbentuk sebagai akibat perjalanan sejarah sebuah negara diberi legitimasi dengan pemikiran politik umat Islam yang mendasarkan pada teks teks agama (Islam).

C. Konfigurasi Pemikiran Politik Islam

Terbentuknya politik Islam merupakan bagian dari respon masyarakat muslim terhadap kebutuhan pengelolaan umat. Secara induktif dapat dipahami, bahwa munculnya kebutuhan akan pemimpin penerus Rasulullah menjadi masalah yang serius yang harus segera dipecahkan. Siapakah pengganti Rasulullah, apa syaratnya, apa tugas dan wewenangnya, adalah pertanyaan pertanyaan riil dan sederhana. Akan tetapi dalam sejarah, jawaban atas pertanyaan itu menjadi kompleks mengingat kompleksitas kepentingan masing masing kelompok yang ada pada waktu itu. Adu argumen yang berakhir dengan permufakatan di Tsaqifah bani Sa'adah merupakan embrio bagi munculnya politik Islam.

Hal menarik adalah argumen yang beredar ketika menentukan siapa yang berhak menjadi pengganti Rasulullah. Setiap kelompok, baik muhajirin maupun Ansar berupaya menjustifikasi argumennya atas dasar teks. Dalam hal ini teks ditundukkan kepada kepentingan politik untuk menguatkan argumen legalitas kekuasaan. Pertarungan argumen ini menarik karena para sahabat yang menjadi peserta waktu itu adalah orang orang yang secara historis memahami teks islam (Al Qur'an dan Hadis). Mereka memiliki pengalaman dan kesempatan yang sama mendapatkan wejangan ajaran islam dari rasulullah. Artinya, ketentuan normatif

teks mereka ketahui dari sumber pertamanya, sehingga mestinya tidak lagi terjadi perbedaan pemahaman. Namun, nafsu politik begitu mencengkeram setiap mereka yang hadir, sehingga teks menjadi sumber sekunder penentuan politik. Sumber primernya adalah kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam menjalankan kekuasaan unsur politik juga mendominasi dalam pengambilan kebijakan. Ketika Abu Bakar memutuskan untuk menyerang para pembangkang zakat, terdapat unsur politik di dalamnya, karena Rasulullah tidak pernah menginstruksikan penyerangan kepada orang yang tidak menjalankan rukun Islam. Umar Ibn Khattab juga melakukan ijtihad politik ketika mempersoalkan pembagian rampasan perang. Secara tekstual praktik Umar bertentangan dengan prakti Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi Umar ingin meletakkan politik dalam ranah keadilan. Usman dalam pemerintahannya mempraktikkan pemikiran tentang koalisi dan aliansi yang mengakibatkan nepotisme. Pada masa Ali Ibn Abi Thalib terjadi politisasi akidah yang menyebabkan lahirnya mazhab politik. Realitas politik di atas tidak diatur dalam teks agama, bahkan ada yang berseberangan dengan teks agama, tetapi semua kebijakan di atas dicarikan landasannya melalui teks agama.

Penundukan teks kepada realitas juga berlaku pada masa berikutnya. Pergantian sistem politik pasca Khulafaur Rasyidin juga dilegalkan dengan sejumlah teks pendukung. Para ulama yang berada dalam pemerintahan berusaha menjadi juru bicara penguasa, sedangkan ulama yang berada di luar pemerintahan bersikap apatis terhadap sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu dalam periode Islam klasik pengkajian tentang fiqh politik tidak menonjol, jika dibandingkan dengan bidang fiqh lainnya, terutama bidang *ahwal asy syakhsiyah*. Hal ini disebabkan oleh dominasi politik atas fiqh yang berpengaruh terhadap intensitas ijtihad.

Secara historis pemikiran muslim tentang pemerintahan mengalami kontinuitas dan perubahan, mulai dari masa klasik hingga modern. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, model pemikiran politik Islam klasik dibagi tiga, yaitu pendekatan sentralisme khalifah, institusional, dan organisme.¹⁵ Pendekatan sentralisme khalifah didukung oleh para filosof muslim seperti Al Farabi, Ibnu Sina, dan Al Ghazali. Menurut kelompok ini, seorang khalifah merupakan sentral dari negara. Kapabilitas seorang khalifah menentukan baik buruknya negara, karena khalifah posisinya sebagai *dhillu allah fi al ardi* (bayangan Tuhan di bumi). Oleh karena itu yang pantas menjadi khalifah menurut Farabi dan Ibnu Sina adalah filof, yang merepresentasikan kemampuan tinggi manusia.

Model kedua menggunakan pendekatan institusional atau kelembagaan. Imam Al Mawardi, penulis buku *Al Ahkam as Sultaniyah* adalah penggagas pendekatan ini. Meskipun tetap mengacu pada sentralisasi khalifah, Al Mawardi memberikan sentuhan kelembagaan dalam pengelolaan negara. Sebuah negara adalah ibarat lembaga, yang harus memiliki struktur dan fungsi kelembagaan yang mendukung tegaknya pemerintahan. Struktur tersebut berupa *khalifah, ahl halli wal aqdi* dan *ahl ikhtiar*. Secara historis, pendapat Al Mawardi ini dianggap sebagai upaya melegitimasi struktur pemerintahan yang berjalan pada masanya, yaitu ketika

¹⁵ lihat dalam "Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Modern, dikutip dari <http://sondis.blogspot.com/2013/04>, diunduh tanggal 3 Juni 2014.

dia menjabat sebagai wazir Khalifah Al Qasim. Teks yang ditulis dalam kitabnya adalah respon terhadap kultur pemerintahan yang berlaku pada masanya.

Pandangan ketiga menggunakan pendekatan organisme, yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Pendekatan ini menggeser sentralisme khalifah dan merupakan kritik sosial terhadap sistem kekhilafahan yang berlaku. Baik buruknya negara, menurut pandangan Ibnu Taimiyah bukan ditentukan oleh khalifah yang berkuasa, tetapi tergantung pada organ negara yang berfungsi. Posisi kepala negara ditentukan oleh ummat yang terwakili dalam lembaga legislatif. Dia menyarankan untuk melakukan reformasi kewenangan dan keagungan khalifah. Oleh karena ini prinsip terpenting dalam organisasi negara adalah keadilan dan syura, yang semuanya itu harus terlembagakan dalam bai'ah. Lahirnya pemikiran ini juga tidak dapat dilepaskan dari situasi pemerintahan masa Ibnu Taimiyah, yaitu ketika dinasti Abbasiyah mengalami distegrasi.

Pada masa modern, konfigurasi pemikiran politik Islam juga mengalami dinamika. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh peta perpolitikan di wilayah Islam yang cenderung didominasi barat. Lahirnya pemikiran politik pada masa ini merupakan respon terhadap hegemoni barat atas dunia Islam, sehingga yang muncul adalah perbedaan sikap umat islam terhadap kemajuan barat, antara *zealotisme* dan *herodianisme*. *Zealotisme* adalah sebuah sikap menutup diri secara fanatik terhadap Barat dan ingin kembali secara introvert kepada praktek Islam masa lalu. *Herodianisme* membuka pintu secara selektif terhadap pengaruh Barat, dengan mengambil model yang baik untuk modernisasi Islam. Dua sikap ini kemudian berimplikasi pada munculnya tiga model pemikiran politik Islam, yaitu konservatif, modernis, dan sekuler.¹⁶

Kelompok konservatif menekankan pada upaya mengintegrasikan islam dan negara dengan konsep *islam din wa daulah*. Kelompok ini masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu tradisional dan fundamentalis. Kelompok modernis menempatkan ajaran islam dalam bidang politik sebagai *guide line* bagi perumusan politik Islam. Kelompok sekuler berseberangan dengan kelompok konservatif dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Kelompok sekuler mendisintegrasikan antara agama dan negara, karena keduanya memiliki wilayah masing masing.

Perbedaan pandangan dari pemikiran politik Islam modern di atas disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam menafsirkan ajaran Islam tentang politik. Kelompok konservatif menggunakan pendekatan idealistik-skripturalistik-formalistik, sedangkan kelompok modernis dan sekuler menggunakan pendekatan realistik-substansialistik-transformatif.¹⁷ Pendekatan pertama memandang bahwa di dalam islam sudah ada aturan baku tentang bentuk dan penyelenggaraan negara. Syari'at Islam berkedudukan sebagai konstitusi negara yang mengandung konsekuensi bahwa agama dan politik bukanlah ranah yang terpisah. Pendekatan ini melahirkan konsep politik teokrasi atau kedaulatan Tuhan. Pendekatan kedua

¹⁶ Kemunculan tiga model pemikiran politik Islam ini dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap masalah pembaharuan teologi, pembaharuan politik, dan transformasi sosial. Lihat Muhammad Nur, *Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern* (Yogyakarta: SUKA Press, 2011), hlm. 4

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72-77

melakukan penafsiran kontekstual terhadap ajaran politik Islam. Di dalam menafsirkan ajaran politik Islam harus mengedepankan nilai etik moral dan tidak terpaku pada simbol kenegaraan yang terpraktikkan di masa lalu. Normatifitas dan historisitas pemerintahan Islam memiliki kedudukan yang berbeda. Normatifitas Islam bersifat universal sedangkan historisitas Islam bersifat partikular. Praktik kenegaraan Islam pada masa lalu bersifat historis yang tidak mengikat umat pada masa sekarang. Masyarakat muslim bebas mengorganisasikan negara dan pemerintahan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

D. Teks, Struktur dan Kultur: Membangun Politik Islam Baru

Membaca pemikiran dan praktik politik Islam dari masa klasik hingga masa modern memperlihatkan adanya hubungan kausalitas antara praktik dan pemikiran. Meskipun sulit untuk menempatkan mana diantara keduanya yang menjadi variabel dominan, tetapi pergulatannya merupakan respon dan akomodasi terhadap situasi dan kondisi yang ada. Dinamika yang terjadi dalam praktik dan pemikiran berjalan seiring dengan kontinuitas dan perubahan yang ada. Maka, relasi antara aksi dan reaksi begitu jelas mewarnai pembentukan dan pergulatan politik Islam sepanjang sejarahnya. Lahirnya sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga munculnya *nation state* adalah merupakan reaksi terhadap realitas (aksi) yang terjadi. Dalam norma sejarah, maka bentuk dan struktur negara yang dibangun umat Islam terikat oleh dimensi ruang (spatial) dan waktu (temporal). Hal yang menarik adalah munculnya pemikiran yang mengikutinya yang berusaha melakukan legitimasi praktik yang ada dengan teks keagamaan yang bernilai normatif.

Negara merupakan pengejawantahan dari realitas sosial oleh suatu bangsa, yang merupakan akumulasi kesadaran akan pengetahuan nilai etis, perilaku sosial dan politik yang berlaku. Realitas inilah yang kemudian dijadikan sebagai ranah kehidupan secara institusional. Dalam pemikiran politik Islam, pengejawantahan tersebut bersumber dari praktik sahabat yang dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam.¹⁸ Akibatnya, praktik politik para sahabat dianggap sebagai prinsip baku politik Islam yang harus diimplementasikan secara universal. Padahal dilihat dari aspek metodologis, praktik para sahabat tersebut adalah hasil ijtihad pribadi, yang sifatnya relatif dan partikular. Pijakan lain dalam pemikiran politik Islam adalah adanya ketergantungan terhadap pribadi-pribadi yang dianggap memiliki kapabilitas eksklusif, sebagaimana yang dianut dalam kepemimpinan Syiah.

Dari aspek historis-antropologis, kultur politik Islam terbangun dan dipengaruhi oleh nalar politik Arab yang fiqh-centris dan filosofis-centris.¹⁹ Nalar fiqh-centris terlihat pada rumusan tentang ketaatan total kepada penguasa, sedangkan filosofis centris tercermin dalam keyakinan jabariyahnya. Dalam sistem khilafah, seorang penguasa (khalifah) memiliki kewenangan politik sekaligus agama, karena posisinya sebagai wakil Tuhan dan pengganti Nabi. Otoritas ini dibatasi oleh

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Syamsul Fata (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 2

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 220

syari'ah sebagai konstitusi negara, yang penafsirannya juga berada dalam otoritas khalifah. Dengan struktur politik seperti ini, khalifah ibarat seorang raja yang sabdanya menjadi hukum bagi warganya, sepanjang dia mampu memberikan legitimasi dari syari'ah. Teks-teks syari'ah ditundukkan ke dalam struktur politik yang dibangun sekaligus untuk mengakomodir kultur yang berlaku dalam masyarakat. Maka, disinilah terjadi hubungan dialektika antara teks-struktur-dan kultur dalam pembentukan politik Islam.

Dalam perspektif fiqh, bentuk politik Islam adalah sesuatu yang ijtihadi dan bukan *tauqifi*.²⁰ Bentuk negara maupun sistem pemerintahan yang dipraktekkan oleh umat Islam adalah hasil kesepakatan masyarakat pada masa dan tempat tertentu. Teks-teks al Qur'an hanya memberikan uraian dasar etis bagi masyarakat. Nabi juga tidak memberikan batasan tentang negara maupun kekuasaan. Secara tidak langsung Nabi menyerahkan pembentukan politik (negara) kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan realitas sosial-budaya yang dihadapi. Disinilah umat Islam dituntut untuk cerdas membangun sistem politiknya, dengan mengadaptasikan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang kemasyarakatan ke dalam realitas masyarakat yang selalu berubah. Di sisi lain umat Islam perlu menjaga dinamika pemikiran politiknya atas dasar *continuity and change*, sehingga struktur pemikiran politik Islam tidak terlepas dari akar historisnya.

Membangun politik Islam baru dapat menggunakan pola adopsi-adaptasi-integrasi. Adopsi dimaksudkan sebagai upaya mengambil bentuk-bentuk politik baru yang berkembang pada masa sekarang. Dalam tahap ini perlu dipertimbangkan bentuk politik mana yang lebih besar kemaslahatannya bagi umat Islam dan masyarakat dunia pada umumnya. Berbagai ragam bentuk politik, mulai dari demokrasi, monarkhi, khilafah, imamah, adalah pilihan-pilihan yang dapat diseleksi sesuai dengan realitas yang dihadapi.

Tahap kedua adalah adaptasi bentuk politik ke dalam sistem politik Islam. Dalam tahap ini, perlu ada penyesuaian bentuk politik yang diadopsi dengan prinsip dasar ajaran Islam. Dalam pandangan Sahrur, ajaran dasar politik Islam adalah syura. Prinsip ini merupakan jalan lempang bagi penerapan kebebasan masyarakat dalam penentuan sistem politik. Masyarakat dalam prinsip syura memiliki hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana dalam rumusan prinsip demokrasi.²¹ Hal terpenting adalah bagaimana para pemikir Islam mentransformasikan prinsip syura tersebut ke dalam sistem politik yang akan diberlakukan. Bentuk-bentuk politik Islam yang ada, sejak masa klasik hingga modern, dapat menjadi pertimbangan dalam upaya adaptasi ini. Penafsiran dinamis terhadap teks-teks politik Islam perlu dilakukan agar ajaran politik Islam terkontekstualisasikan dalam realitas sosial.

Tahap ketiga adalah integrasi, sebagai hasil adaptasi antara bentuk politik yang ada dengan prinsip dasar politik Islam. Hasil integrasi ini merupakan paduan antara teks syariah, struktur pemikiran ulama dan kultur masyarakat. Model integrasi ini

²⁰ Saifuddin, *Khilafah vis a vis Nation State, Telaah Atas Pemikiran Politik HTI* (Yogyakarta: Mahameru, 2012), hlm. 21

²¹ Syahrur, *Tirani Islam...*, hlm. 221

berlangsung *soft* sehingga masyarakat tidak merasakan perubahan yang ada. Integrasi ini menekankan pada *shifting paradigm* dan bukan pada simbol politik. Meskipun pada akhirnya menggunakan bentuk politik yang ada, tetapi substansi dan arah politiknya berubah, sehingga *maqasid syari'ah* dari ajaran politik Islam termanifestasikan. Politik Islam yang dipraktikkan bertumpu pada asas tauhid, 'adalah (keadilan), syura (musyawarah), dan hurriyah (kebebasan).²²

E. Penutup

Melihat dan membaca dinamika politik Islam memperjelas dan memperkuat bahwa sistem politik Islam tidaklah bersifat monolitik. Tidak ditemukan *nash* yang tegas (*qat'y*) tentang bentuk dan sistem pemerintahan yang harus dijalankan umat Islam. Ketiadaan legalitas normatif ini membuka pintu kreatifitas bagi umat Islam untuk berijtihad membentuk dan menetapkan sistem politik yang akan dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Variasi sistem politik yang ada harus diposisikan secara positif dan produktif, sebagai bukti bahwa pemikiran umat Islam dalam mengimplementasikan ajaran agamanya, dalam bidang politik khususnya, bergerak dinamis dalam upaya mewujudkan konsep Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Daftar Pustaka

- Coulson, Noel J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Enginer, Asghar Ali, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hassan, Ibrahim Hasan, *Tarikh al Islam as Siyasi wa ad Diny wa ats Tsaqafi wa al Ijtima'y*, cet III, Kairo: Maktabah an Nahdhah al Mishriyah, 1964.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2005.
- Lapidus, Ira M, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Montimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1984.
- Mujib, M., *The Indian Muslim*, London: George Press, 1967.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya I*, Jakarta: UI Press, 1979.

²² Selengkapnya dapat dibaca dalam Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam...*, hlm. 51-61.

Nur, Muhammad, *Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern*, Yogyakarta: SUKA Press, 2011.

Saifuddin, *Khilafah vis a vis Nation State, Telaah Atas Pemikiran Politik HTI*, Yogyakarta: Mahameru, 2012.

Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Syamsul Fata, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Zainuddin, Muhadi, dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Konsep, Teori dan Praktiknya dalam Sejarah*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012.

[http: // sondis.blogspot.com /2013/04/](http://sondis.blogspot.com/2013/04/), "Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Modern, diunduh tanggal 3 Juni 2014.